

Kontrol Sosial Korupsi: Studi terhadap Gerakan Sosial Indonesia Corruption Watch (ICW) Dalam Advokasi Pembatalan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) = Social Control on Corruption: A Study on Indonesia Corruption Watch (ICW)'s Social Movement in the Advocation of Nullification of the Amendment of the Law No. 30 of 2002 Regarding Corruption Eradication Commission (KPK)

Meisy Rizki Martin Ayumi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20514795&lokasi=lokal>

Abstrak

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang ditentang oleh sejumlah pihak di Indonesia. Pertentangan tersebut didasari oleh penilaian bahwa revisi UU KPK adalah undang-undang yang pro koruptor akibat adanya sejumlah kebijakan yang dinilai melemahkan kinerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menentang keras pengesahan revisi UU KPK adalah LSM bernama Indonesia Corruption Watch (ICW). Pertentangan tersebut selanjutnya dilihat dalamacamata kontrol sosial korupsi sebagai bentuk reaksi sosial informal atas upaya penanganan tindak penyimpangan yang merujuk pada korupsi. Kontrol sosial oleh ICW dimanifestasikan dalam upaya pembatalan revisi UU KPK yang akan dijelaskan secara kriminologis. Analisis mengenai kondisi gerakan sosial selama advokasi berlangsung juga akan dijelaskan dengan menggunakan teori Status Politik oleh Gusfield yang menekankan aspek dramatik, aksi politik, konflik prestise dan pengakuan prestise

.....The amendment of the Law about Corruption Eradication Commission (KPK) or UU KPK is one among several disputed policy that enrage many parties in Indonesia. The dispute roots on the view how the amendment of this law turns the law to be very lenient towards the corruptors because there are several policies that seem to debilitate KPK in eradicating corruption. One of the strongest opposing parties against this amendment is a non-government organization named Indonesia Corruption Watch (ICW). This opposition then will be examined through the view of social control against corruption crime as an informal social reaction to the attempt to handle the occuring deviation, referring to corruption. ICW has manifested their social control in nullification of the revision of UU KPK. These attempts will be annotated criminologically. The analysis regarding the social movement during the advocation will be seen from Gusfield's theory of status politics, emphasizing on the aspects of dramatisms, political action, prestige conflicts, and prestige recognition.